

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2018. *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Arianto H. 2012. *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*. Esa Unggul University.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darda Syahrizal. S. H. 2018. *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*. Media Pressindo.
- DJKP Kementrian Keuangan. 1992. *Buku Retribusi PBG*. Jakarta: Kemekeu
- Efendi. J. 2016. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata. hukum pidana. hukum administrasi & hukum tata negara. serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*. Indonesia: Prenadamedia Group.
- Henry. 2019. *Sandang Pangan Pembangkangan: Civil Disobedience*. Lingkaran: Jakarta.
- Iswi hariyani dkk.. 2021. *Property Top Secret: Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Andi.
- Jonaedi. dkk.. *Kamus Istilah Hukum Populer*. 2016. Jakarta: Prenada media.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Kelsen. H. 2012. *Essays in legal and moral philosophy (Vol. 57)*. Springer Science & Business Media.
- Kemendikbud. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. *Booklet Cipta Lapangan Kerja*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.

- Mertokusumo. S. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ghalia.
- Nunuk Nuswardani. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Scopindo Media Pustaka. Tahun 2020
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Garut. 2020. *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Garut Tahun 2020*. Garut: Pemkab Garut.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.:Kencana Prenada Media.
- Restianingrum. 2019. *Seni Menjadi Pribadi yang Diterima & Disukai di Mana pun dan Kapan pun: Hasil penelitian menunjukkan 85% kesuksesan seseorang ditentukan karena mereka diterima dan disukai orang lain*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ridwan. J. Ahmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik Nuansa: Bandung*.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rumokoy. D. A.. & Maramis. F. 2016. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia: Bandung.
- Santoso. U. 2017. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo. 2015. *Ilmu hukum Cetakan ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. B. A. 2016. *Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematis yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Unpar Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto. T. 2014. *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*. Buku Pintar. Jakarta.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Tjandra. W. R. 2021. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Urip Santoso. 2017. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Yunus dan Azhar. 2021. *Hitam Putih Kebijakan Publik Di Indonesia*. Adab: Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
- Surat Edaran Mendagri No. 011/5976/SJ Tahun 2021.
- Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang: Perumahan Dan Pemukiman' (1992) 115 Lembaran Negara RI Tahun.
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung

C. Jurnal

Ardina Sukmawati. *Pengawasan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*. Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum. Semarang: Unika Soegija. 2013

Arliman. L. (2018). *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1). 761-770.

Atang H. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30 No. 1 Februari 2014

Cooke A. Smith D dan Booth A. 2012. *Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis*. *Qual Health Res*.

Dora Kusumastuti. 'Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan' (2015) *Yustisia Jurnal Hukum* 541.

Dwi Nurani. "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah. Pada SDN di Kota Jakarta Selatan". Tesis Ilmu administrasi. Program Pasca Sarjana Fisip UI. (Jakarta: UI. 2009). Tidak Dipublikasikan.

Finna Rizqina. *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di kecamatan Kalideres*. Tesis Ilmu administrasi. Program Pasca Sarjana Fisip UI. (Jakarta: UI. 2010)

Iwan Tejakusuma. 2016. *Bencana Banjir Bandang Di Garut 20 September 2016*. *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*. Vol. 11. No. 2.

Moher D. Liberati A. Tetzlaff J. Altman DG. 2009. *The PRISMA Group Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement*. *PLoS Med*. Volume 2. tahun 2009.

- Pemerintah Kabupaten Karo. “Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan 2017”. <https://karokab.go.id/id/component/content/article/124-profil-pemerintahan/skpd/5916-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-perizinan-terpadu-satu-pintu> diakses 12 November 2021
- Ria Anggraini dan Suria. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Di Kota Kabanjahe Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten karo No. 06 Tahun 2012*. Jurnal USU Vol 5. No. 1 tahun 2017
- Riki Perdana. 2017. *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*. JDIHN Mahkamah Agung RI.
- Snyder. 2019. *Literature Review as a Research Methodology An Overview and Guidelines*. Journal of Business Research Volume 4 No.2.
- Syamfitriani Asnur, dkk. 2019. *Pola Tata Ruang Rumah Deret dan Pengaruhnya Terhadap Optimasi Penghawaan Alami*. Program Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNM Vol 3. No. 1.
- Syarif Budiman. 2017. *Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan Uu No. 14 Tahun 2008*. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Tushnet. Mark. 1997. *Making Constitutional Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court. 1961-1991*. Britania Raya. Oxford University Press.